

## DAFTAR PUSTAKA

- Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D.I., Smith, R., dan Williams, S., 2001, *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council, Indonesia.
- Furlong, G.T., 2005, *The Conflict Resolution Toolbox: Models & Maps for Analyzing, Diagnosing, and Resolving Conflict*, Mississauga, Ontario: John Wiley & Sons Canada, Ltd.
- Hartono, dkk., 2012, *Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Hidayana, B., dkk., 2012, *Laporan Penelitian: Komunitas Lereng Merapi serta Respon Terhadap Erupsi Merapi*, Yogyakarta: Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi (LAURA).
- Moleong, L.J., 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pranowo, H.A., 1985, *Manusia dan Hutan: Proses Perubahan Ekologi di Lereng Gunung Merapi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pruitt, D.G. dan Rubin, J.Z., 2011, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shohibuddin, M. (ed), 2009, *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*, Bogor: Sajogyo Institute bekerjasama dengan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Pusat Kajian Agraria (PKA) IPB.
- Shohibuddin, M. (ed), 2009, *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria, Gunawan Wiradi*, Yogyakarta: STPN Press bekerja sama dengan Sajogyo Institute.
- Triyoga, L.S., 1991, *Manusia Jawa dan Gunung Merapi: Persepsi dan Kepercayaanannya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

### Instansi:

- Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Pusat Studi Agroekologi Universitas Gadjah Mada, 2004, *Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi Periode 2005-2024*.
- Balai Taman Nasional Gunung Merapi, 2012, *Penataan Zonasi Taman Nasional Gunung Merapi*.
- Balai Taman Nasional Gunung Merapi, 2012, *Review Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi 2013-2022*.
- Balai Taman Nasional Gunung Merapi, 2013, *Statistik Balai Taman Nasional Gunung Merapi Tahun 2013*.
- Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan, Desa Ngablak, 2014.

Pengadilan Negeri Magelang, 1982, “Ikhtisar Putusan Nomor 58/1982 tanggal 21 Agustus 1982”.

#### Jurnal:

Arfani, R.N., 2005, “*Governance* sebagai pengelolaan konflik”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 8, No. 3, Maret 2005, hal. 309-330.

Kuswijayanti, E.R., Dharmawan, A.H., Kartodihardjo, H., 2007, “Krisis-krisis *Socio-Political-Ecology* di Kawasan Konservasi: Studi Ekologi Politik di Taman Nasional Gunung Merapi”, *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Vol. 01, No. 01, hal. 41-66.

#### Internet:

Arsyad, I., n.y, “Mendorong Penyelesaian Konflik Tenurial Desa-Desa Dalam Kawasan Hutan: Pengalaman dari 10 Desa Model”, WG-Tenure, hal. 1-17, <[http://www.epistema.or.id/download/Idham\\_Arsyad-Mendorong\\_Penyelesaian\\_Konflik\\_Tenurial\\_Desa\\_Desa\\_Dalam\\_Kawasan\\_Hutan.pdf](http://www.epistema.or.id/download/Idham_Arsyad-Mendorong_Penyelesaian_Konflik_Tenurial_Desa_Desa_Dalam_Kawasan_Hutan.pdf)> (diakses 27 Februari 2015).

FORCLIME-GTZ, n.y, *Forests and Climate Change*, “Penataan Batas Taman Nasional Kayan Mentarang Partisipatif”, *Briefing Paper* No. 4, hal. 1-3, <[http://heartofborneo.or.id/uploads/parks\\_reports/brief\\_paper4\\_tata\\_batas\\_partisipatif\\_tnkm.pdf](http://heartofborneo.or.id/uploads/parks_reports/brief_paper4_tata_batas_partisipatif_tnkm.pdf)> (diakses 27 Februari 2015).

Mulyana, A., Moeliono, M., Minnigh, P., Indriatmoko Y., Limberg G., Utomo, N.A., Iwan, R., Saparuddin, dan Hamzah, 2010, “Kebijakan Pengelolaan Zona Khusus: Dapatkah meretas kebuntuan dalam menata ruang Taman Nasional di Indonesia?” *Brief*, CIFOR, No.01, April 2010, hal. 1-6, <[http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/infobrief/001-Brief1.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/001-Brief1.pdf)> (diakses 27 Februari 2015).

Munawir, A. dan Santoso, P., 2008, “Perlu Strategi Partisipatif Menuntaskan Tata Batas Taman Nasional Siberut”, Hasil Penugasan Diklat SECEM-2008, hal.1-12, <<https://mrbudisantoso.files.wordpress.com/2009/01/strategitatabas-tnsiberut.pdf>> (diakses 27 Februari 2015)

Perum Perhutani Sejarah Perusahaan, <<http://perumperhutani.com/profil/sejarah/>> (diakses 8 Januari 2015).

Sunyoto, K.Ng.H.A., 2011, Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi, Ditohi Pati – Amuk, Carok, Siri, <<http://pesantrenbudaya.com/?id=109>> (diakses 25 Februari 2015).

TN Gunung Merapi, <[http://www.dephut.go.id/uploads/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/TN\\_GnMerapi.htm](http://www.dephut.go.id/uploads/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/TN_GnMerapi.htm)> (diakses 1 Desember 2014).

### **Bahan Kuliah:**

- Arfani, R.N., 2013, “Pengelolaan Konflik”, Bahan Kuliah Manajemen Konflik I, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Mas’oed, M., 2013, “*Human Needs & Conflict*”, Bahan Kuliah Ruang Lingkup Perdamaian dan Resolusi Konflik, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Panggabean, S.R., 2014, “Beberapa Teknik Manajemen Konflik ADR”, Bahan Kuliah Manajemen Konflik II, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 134/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam pada Kelompok hutan Gunung Merapi seluas  $\pm 6.410$  (enam ribu empat ratus sepuluh) hektar, terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Taman Nasional Gunung Merapi.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.